

## EFEKTIVITAS BELANJA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH ADAT LA PAGO DI PAPUA

**Ida Ayu Purba Riani<sup>1</sup>**  
dayurin2023@gmail.com

**Yundy Hafizrianda<sup>2</sup>**  
yundyhafizrianda@gmail.com

### ABSTRACT

*This study generally aims to analyze the level of effectiveness of regional spending on the development of macro- and socio-economic performance in the Wilayah Adat La Pago. The macro-socio-economic performance measured is economic growth, the Human Development Index (HDI), and the poverty rate. There are two tools used to measure it: discrete elasticity and continuous elasticity. Referring to the results of the continuous elasticity analysis, it was found that regional spending in the Wilayah Adat La Pago as a whole is effective in driving economic growth. An increase in regional spending of 1% is able to increase the Gross Domestic Regional Product (GDRP) by 0.69% on average. Although regional spending has a significant effect on increasing HDI, its level of effectiveness is very low. An increase in regional spending of 1% is only able to increase HDI by 0.19%. Regional spending also has a significant effect on reducing poverty, but its level of effectiveness is very low. An increase in regional spending of 1% is only able to reduce the poverty rate by 0.13%. Specifically, this analysis also identified that Nduga, Lanny Jaya, and Yalimo Regencies have the best performance in making regional spending effective to drive economic growth. Then, for the effectiveness of regional spending on the Human Development Index, only Nduga Regency is indicated as the best. And finally, in reducing poverty, there are two regencies, namely Yalimo and Puncak Jaya.*

*Keywords: Regional Spending, Effectiveness, Elasticity*

### PENDAHULUAN

Studi mengenai efektivitas belanja dalam pembangunan suatu daerah masih sangat terbatas. Umumnya, jika berbicara mengenai efektivitas, ide yang keluar pertama kali adalah membandingkan antara realisasi pendapatan dengan targetnya. Dengan kata lain analisis efektivitas cenderung lebih banyak pada ruang lingkup anggaran pendapatan. Untuk studi kali ini, ruang lingkup efektivitas fokus pada anggaran belanja daerah, yang diukur tidak lagi menggunakan rasio antara realisasi dan target, tetapi pada kemampuan belanja daerah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan/sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ide ini keluar, oleh karena berbagai teori dan konsep yang menjelaskan efektivitas semuanya berakhir pada kata kunci tercapainya tujuan.

McCormick (1981) misalkan, ia mengatakan efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas. Selaras dengan argumentasi Mandl *et al* (2008), yang mengatakan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana menurut Codagnone and Undheim (2008), efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana input dan output mampu mencapai hasil yang diinginkan untuk kelompok sasaran tertentu dan terbatas (hasil langsung), seluruh sektor (hasil menengah), serta masyarakat dan/atau ekonomi secara keseluruhan (hasil akhir). Selanjutnya, jika dikaitkan dengan ekonomi, Poskart (2014) menunjukkan bahwa efektivitas ekonomi merupakan suatu cara untuk mengukur keberhasilan dan tujuan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan membandingkan (rasio) nilai hasil yang diperoleh dengan faktor-faktor yang dikeluarkan untuk mencapainya. Lebih jauh Mandl *et al* (2008) juga mengatakan bahwa efektivitas ekonomi sering dikaitkan dengan tujuan kesejahteraan atau pertumbuhan, dan oleh karena itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor (termasuk output tetapi juga

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

faktor 'lingkungan' eksogen). Efektivitas lebih sulit dinilai daripada efisiensi, karena hasil dipengaruhi oleh pilihan politik.

Dari berbagai konsep dan argumentasi di atas, jika dikaitkan dengan belanja daerah, maka yang dimaksud efektivitas belanja daerah adalah sejauh mana penggunaan belanja daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas ini mengukur seberapa berhasil pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pada program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pokok yang telah direncanakan, sehingga dapat memberikan manfaat pembangunan yang nyata bagi masyarakat. Dimana manfaat pembangunan ini dapat diterjemahkan dalam konteks makro dan mikro. Khusus pada makro pembangunan atau pembangunan dalam skala besar, manfaatnya dapat terlihat pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, kenaikan pendapatan per kapita, perluasan lapangan kerja, akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, pemerataan pembangunan wilayah, stabilitas politik dan sosial, peningkatan daya saing global, dan sebagainya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah sangat terkait erat dan memiliki hubungan kausalitas dengan berbagai manfaat makro pembangunan tersebut, baik itu berhubungan kausal secara langsung (*direct causality*), maupun secara tidak langsung (*indirect causality*).

Telah diketahui bahwa Provinsi Papua hingga tahun 2021 terdiri atas 29 kabupaten/kota yang terbagi pada 5 Wilayah Adat yaitu Ha Anim, Mee Pago, La Pago, Saereri dan Mamta. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, Wilayah Adat Ha Anim terdiri atas Kabupaten Merauke, Boven Digul, Asmat dan Mappi. Kemudian Wilayah Adat Mamta adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya. Sementara untuk Wilayah Adat Mee Pago adalah Kabupaten Mimika, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya. Selanjutnya Wilayah Adat La Pago terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Lanni Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, dan Nduga. Dan terakhir, Wilayah Adat Saereri adalah Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor dan Supiori. Dalam konteks perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Papua selama ini, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang diterapkan pada masing-masing Wilayah Adat tersebut berbeda satu sama lainnya, hal ini dikarenakan karakteristik dan topografi wilayah masing-masing tidak sama, yang menyebabkan kondisi makro sosial-ekonomi antarwilayah adat juga tidak sama.

Jika diamati berdasarkan data-data makro yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Papua (2023, diolah), kondisi sosial-ekonomi makro di Wilayah Adat La Pago paling memprihatinkan dibandingkan daerah-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah adat lainnya. Misalkan untuk tingkat kemiskinan, sepanjang tahun 2010-2021 tingkat kemiskinan tertinggi semuanya ada di kabupaten yang terletak Wilayah Adat La Pago, mulai dari Lanny Jaya, Jayawijaya, Nduga, dan seterusnya hingga Pegunungan Bintang. Sebagai contoh di tahun 2021, rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten di wilayah adat ini berkisar antara 30,46% paling rendah di Pegunungan Bintang, dan 38,73% paling tinggi di Lanny Jaya. Angka kemiskinan di Lanny Jaya tersebut terindikasi paling tinggi di Indonesia untuk tahun 2021. Hal yang sama juga untuk kualitas pembangunan manusia yang direpresentasikan dengan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia), seluruh kabupaten di Wilayah Adat La Pago memiliki IPM terendah di Papua. Dimana paling rendah Kabupaten Nduga dengan IPM hanya sebesar 32,84 poin, yang juga merupakan IPM terendah di Indonesia pada tahun 2021. Interval angka IPM di Wilayah Adat La Pago berkisar antara 32,84 poin sampai dengan 58,67 poin. Adapun dari aspek perekonomian, tingkat kesejahteraan penduduk di Wilayah Adat La Pago dapat dikatakan paling rendah di Tanah Papua. Sebagai indikasinya dapat dilihat pada besaran tingkat pendapatan per kapita. Hingga tahun 2021, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Wilayah Adat La Pago hanya sebesar Rp. 1,39 juta per kapita, sangat jauh dibawah pendapatan per kapita Wilayah Adat Mamta yang mencapai Rp. 7,54 juta per kapita, atau Ha Anim sebesar Rp. 4,22 juta per kapita. Pendapatan per kapita terendah di Wilayah Adat La Pago adalah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Yalimo, masing-masing sebesar Rp. 0,76 juta dan Rp. 0,78 juta per kapita. Dan sekali lagi angka ini merupakan yang paling rendah juga di Indonesia. Sementara jika dilihat pada pertumbuhan ekonomi, kondisi di Wilayah Adat La Pago tampak kurang baik, oleh karena sepanjang tahun 2010-2021 rata-rata pertumbuhannya hanya mencapai 1,70% per tahun dibawah Saereri, Mamta dan Mee Pago, ketiganya di atas 2,25% per tahun.

Ironisnya, belanja daerah yang dikelola dari seluruh kabupaten yang ada di Wilayah Adat La Pago bila ditotal semuanya sepanjang tahun 2010-2021 menunjukkan angka yang fantastis mencapai Rp. 124,44 triliun, atau rata-rata per tahun sebesar Rp. 10,37 triliun. Dengan tingkat pertumbuhannya

bisa mencapai 8,25% per tahun. Besaran total dan pertumbuhan belanja tersebut teridentifikasi paling tinggi di Wilayah Papua selama ini. Bandingkan dengan Wilayah Adat Mee Pago, yang menyimpan kekayaan tambang terbesar di dunia, total belanja daerahnya untuk penilaian yang sama hanya sebesar Rp. 78,37 triliun, atau rata-rata sekitar Rp. 6,53 triliun per tahun (DJPK, 2023, data diolah). Seharusnya, dengan total nilai belanja daerah yang sangat besar itu, kondisi pembangunan sosial-ekonomi di Wilayah Adat La Pago bisa lebih baik dibandingkan wilayah adat lainnya di Papua, paling tidak sejajar dengan Wilayah Adat Mamta yang memiliki kinerja makro sosial-ekonomi terbaik di Papua selama ini. Padahal total belanja daerah di Wilayah Mamta untuk periode yang sama hanya sejumlah Rp. 4,76 triliun, sangat jauh dibawah La Pago.

Beranjak pada berbagai fenomena yang kontras antara kondisi makro sosial-ekonomi dengan perkembangan belanja daerah yang terlihat pada Wilayah Adat La Pago di atas, serta berpijak pada konsep-konsep efektivitas belanja yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menarik sekali untuk diamati dan dianalisis mengenai efektivitas belanja daerah di Wilayah Adat La Pago, yang dituangkan dalam suatu judul penelitian yaitu *Tingkat Efektivitas Belanja Daerah Dalam Pembangunan Wilayah Adat La Pago Di Papua Tahun 2010-2021*. Oleh karena ruang lingkup pembangunan daerah itu sangat luas, khusus pada studi kali ini aspek-aspek pembangunan yang menjadi fokus pengamatan adalah perkembangan ekonomi yang diindikasikan dengan PDRB, kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskinan, dan kualitas pembangunan manusia menggunakan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sedangkan yang menjadi lokus penelitian adalah Wilayah Adat La Pago yang terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Lanni Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Sesuai dengan fokus dan lokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah : (1) mengetahui dan menganalisis perkembangan makro sosial-ekonomi dan belanja daerah di Wilayah Adat La Pago; (2) mengukur dan menganalisis tingkat efektivitas belanja daerah di Wilayah Adat La Pago; (3) memberikan rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan efektifitas belanja daerah di Wilayah Adat La Pago.

**METODE ANALISIS**

Untuk mengukur tingkat efektifitas berdasarkan hubungan kausalitas, maka alat yang tepat digunakan dalam ilmu ekonomi adalah analisis elastisitas. Elastisitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan suatu variabel akibat perubahan variabel lainnya. Sederhananya, elastisitas mengukur tingkat kepekaan suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya, atau secara kuantitatif merupakan rasio marginal pertumbuhan antara variabel *independent* (X) dengan variabel *dependent* (Y), yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$E_{xy} = \frac{\Delta Y/Y}{\Delta X/X} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} \frac{X}{Y} \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan konsep matematik, persamaan (1) dapat dikatakan sebagai ukuran elastisitas diskrit, oleh karena dihitung untuk satu titik waktu tertentu.

Selain dalam bentuk diskrit, nilai elastisitas dapat juga dihitung menggunakan ukuran kontinu, dengan menggunakan model regresi time series double log, sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y_t = \text{Ln } a_0 + a_1 \text{ Ln } X_t \dots\dots\dots (2)$$

Turunan pertama dari persamaan (2) adalah  $\Delta \text{Ln} Y / \Delta \text{Ln} X = a_1$ . Dimana dalam konteks ekonomi  $\Delta \text{Ln} Y / \Delta \text{Ln} X$  sering disebut sebagai elastisitas logaritmik. Dengan demikian, nilai koefisien  $a_1$  yang merupakan turunan dari persamaan (2) merupakan ukuran dari nilai elastisitas. Oleh karena koefisien  $a_1$  bersifat kontinu, maka secara statistik nilainya dianggap sebagai rata-rata dari elastisitas sepanjang tahun pengamatan.

Secara absolut nilai elastisitas dapat sama dengan 1, lebih dari 1, atau kurang dari 1. Dalam operator matematik ditulis,  $E \geq 1$ . Jika  $E < 1$  dikatakan elastis, yang menunjukkan untuk setiap kenaikan input X sebesar 1% maka direspon oleh kenaikan output Y lebih besar dari 1%. Ini berarti meningkatkan output Y lebih besar dari kenaikan input X, yang dapat digeneralisasikan lebih jauh bahwa penggunaan input X efektif untuk meningkatkan Y. Sebaliknya jika  $E < 1$  dikatakan inelastis, yang mengindikasikan untuk setiap kenaikan input X sebesar 1% hanya direspon oleh kenaikan output Y kurang dari 1%, yang dapat diartikan penggunaan input X tidak efektif meningkatkan output Y.

Ilmu ekonomi tidak membuat kategori pada *range interval* nilai elastisitas, sehingga hanya ada 2 penilaian ekstrim yaitu elastis (efektif) atau inelastis (tidak efektif). Hal ini menjadi kurang fair kalau diterapkan pada penilaian efektifitas belanja daerah, karena semua daerah dalam mengelola belanjanya selalu diarahkan untuk mencapai tujuan/sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang berarti penggunaan belanja daerah semuanya mengarah pada efektivitas. Hanya sekarang, kadar efektivitas belanja dari masing-masing daerah dipastikan tidak sama, ada yang sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan seterusnya. Mengacu pada argumentasi tersebut, maka dalam studi kali ini nilai elastisitas dibagi dalam 5 (lima) interval dan kategori sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Kategori Efektifitas Berdasarkan Nilai Elastisitas**

<b>Interval Elastisitas</b>	<b>Kategori</b>
> 0.80	Sangat Efektif
0.60 – 0.80	Efektif
0.40 – 0.60	Cukup Efektif
0.20 – 0.40	Kurang Efektif
< 0.20	Sangat Kurang Efektif

Sumber : data diolah (2024)

Kategori elastisitas yang tercantum pada Tabel 1 di atas perlu ditambahkan juga dengan penjelasan kondisi yang bersifat kontraditif jika dilihat dari arah elastisitasnya. Dalam hal ini, jika arah koefisien elastisitas tidak sesuai dengan teori ekonomi, maka dikatakan tidak efektif. Sebagai misal, sesuai dengan teori ekonomi, elastisitas harga terhadap penawaran seharusnya positif (+Es), yang artinya jika harga naik maka penawaran juga ikut naik, dan jika harga turun maka penawaran juga ikut turun, sehingga dalam kondisi ini dikatakan harga **efektif** meningkatkan penawaran. Namun, seandainya ditemukan elastisitas penawaran bertanda negatif (-Es), yang bertentangan dengan teori ekonomi, maka dapat disimpulkan harga **tidak efektif** meningkatkan penawaran. Argumentasi ini akan diberlakukan juga dalam menganalisis efektifitas belanja daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Belanja Daerah, PDRB, IPM dan Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Adat La Pago

Belanja daerah di wilayah adat La Pago pada Tabel 2, cenderung meningkat sepanjang tahun 2010-2021. Tahun 2010 total Belanja daerah tercatat sebesar Rp5.221milyar dan tahun 2021 sebesar Rp12.493 milyar dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 8,25% per tahun. Namun jika diamati perkembangan belanja daerah pada wilayah La Pago maka terdapat kecenderungan belanja daerah menurun di tahun 2017 yang disebabkan turunnya belanja daerah di Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Mambramo Tengah sehingga berdampak pada Penurunan signifikan di wilayah La Pago. Selanjutnya tahun 2018 meningkat kembali sampai dengan tahun 2019, kemudian menurun kembali di tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19 yang mana pemerintah pusat melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk mendukung pencegahan covid-19 sehingga berdampak pada berkurangnya porsi belanja daerah untuk tahun 2020. Jika diamati dari pertumbuhan belanja daerah per kabupaten pada periode 2010-2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Yalimo, Tolikara dan Lanny Jaya memiliki pertumbuhan belanja daerah terbesar, sedangkan yang terendah pertumbuhan belanja daerah yaitu di Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Yahukimo. Jika diamati dari kontribusi terbesar belanja daerah per kabupaten terhadap wilayah La Pago, terlihat bahwa Yahukimo menduduki urutan pertama yakni mencapai 11,45% dengan rata-rata belanja daerah sebesar Rp1.187,14 milyar, diikuti oleh Jayawijaya mencapai 11,25% dengan rata-rata belanja daerah Rp1.166,76 milyar dan Pegunungan Bintang mencapai 11,17% dengan rata-rata Belanja daerah sebesar Rp1.158,59 milyar per tahun. Sedangkan jika diamati dari kontribusi terendah belanja daerah pada wilayah La Pago, maka Mambramo Tengah sebesar 7,81% dengan rata-rata Rp810,02 milyar, diikuti oleh Nduga sebesar 8,77% dengan rata-rata Rp902,82 milyar dan Yalimo sebesar 8,95% dengan rata-rata Rp927,71 milyar per tahun.

**Tabel 2. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Di Wilayah Adat La Pago Dirinci Menurut Kabupaten Tahun 2010-2021 (Rp milyar)**

Tahun	Jayawijaya	Puncak Jaya	Yahukimo	Pegunungan Bintang	Tolikara	Nduga	Lanny Jaya	Manberamo Tengah	Yalimo	Puncak	La Pago
2010	618,78	617,48	701,68	726,19	484,05	416,41	448,21	412,44	351,71	444,59	5.221,53
2011	728,79	694,84	700,50	709,31	583,08	534,52	571,67	122,92	508,45	565,54	5.719,62
2012	686,86	688,81	709,75	377,89	585,28	642,48	639,11	561,40	593,78	679,66	6.165,01
2013	954,56	823,60	813,85	980,92	698,39	656,85	829,94	632,27	778,11	978,28	8.146,76
2014	964,54	979,50	890,87	1.039,29	815,27	773,35	1.007,90	889,68	871,90	1.151,51	9.383,81
2015	1.371,97	1.214,56	1.210,59	1.314,81	1.173,72	958,97	1.293,07	969,97	1.042,64	1.594,39	12.144,69
2016	1.447,47	1.483,72	1.435,04	1.485,85	1.290,74	1.116,50	1.418,12	1.182,81	1.239,05	1.481,00	13.580,30
2017	1.571,71	1.231,31	1.540,78	1.554,18	1.344,07	1.189,24	1.332,36	1.033,11	1.129,59	844,04	12.770,38
2018	1.549,71	1.428,58	1.603,79	1.477,74	1.578,86	1.290,48	1.389,87	1.075,19	1.232,23	862,19	13.488,65
2019	1.426,44	1.277,05	1.672,40	1.572,87	1.699,48	1.357,62	1.328,53	958,69	1.288,84	903,33	13.485,24
2020	1.331,35	1.225,34	1.456,34	1.273,25	1.443,23	921,37	1.239,73	951,45	1.070,58	924,97	11.837,61
2021	1.348,97	1.300,26	1.510,06	1.390,83	1.482,87	1.060,08	1.275,49	930,38	1.025,70	1.168,56	12.493,19
<b>Rata-Rata :</b>											
Nilai Belanja	1.166,76	1.080,42	1.187,14	1.158,59	1.098,25	909,82	1.064,50	810,02	927,71	966,51	10.369,73
Pertumbuhan	7,34	7,00	7,22	6,09	10,71	8,87	9,97	7,68	10,22	9,18	8,25
Kontribusi	11,252	10,419	11,448	11,173	10,591	8,774	10,265	7,811	8,946	9,320	100,00

Sumber : data diolah (2024)

Jumlah nilai tambah unit produksi pada sektor perekonomian yang menggambarkan kinerja ekonomi di La Pago mengalami perkembangan yang fluktuatif sepanjang tahun 2010-2021. Pada tabel 3 jika diamati perkembangan PDRB di La Pago secara rata-rata mencapai 5,53% dengan sumbangan terbesar berasal dari Kabupaten Lanny Jaya sebesar 8,26%, Nduga sebesar 7,76% dan Yalimo sebesar 7,45% per tahun. Kontribusi terendah pertumbuhan PDRB di La Pago sepanjang periode yang sama teramati di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 3,33%, Tolikara sebesar 4,07% dan Jayawijaya sebesar 4,88% per tahun. Namun jika diamati dari besaran nilai tambah yang diciptakan unit-unit produksi pada masing-masing Kabupaten, maka terlihat bahwa proporsi terbesar dalam pembentukan PDRB di La Pago, yaitu Kabupaten Jayawijaya sebesar 33,68% dengan nilai Rp3,818,75 milyar, Yahukimo sebesar 10,91% dengan nilai Rp1.237,28 milyar dan Pegunungan Bintang sebesar 10,16% dengan nilai Rp1.152,06 milyar rata-rata per tahun. Sedangkan Proporsi terendah dalam pembentukan nilai tambah teramati di Kabupaten Yalimo yaitu sebesar 5,25% dengan nilai Rp595,26 miliar rata-rata per tahun.

**Tabel 3. Perkembangan PDRB Di Wilayah Adat La Pago Dirinci Menurut Kabupaten Tahun 2010-2021 (Rp milyar)**

Tahun	Jayawijaya	Puncak Jaya	Yahukimo	Pegunungan Bintang	Tolikara	Nduga	Lanny Jaya	Manberamo Tengah	Yalimo	Puncak	La Pago
2010	2.716,43	677,55	809,99	831,08	685,42	357,06	491,93	363,12	353,34	433,35	7.719,25
2011	2.883,25	691,19	907,09	879,56	740,55	405,74	638,11	404,02	387,94	456,39	8.393,84
2012	3.104,40	721,70	1.006,77	934,38	742,37	471,90	745,30	469,92	444,07	491,91	9.132,70
2013	3.331,65	755,25	1.075,08	995,10	788,04	524,99	805,98	520,44	498,81	537,16	9.832,50
2014	3.568,26	788,37	1.150,54	1.058,16	840,99	574,66	865,51	565,51	547,91	587,67	10.547,58
2015	3.794,40	846,84	1.232,49	1.121,09	882,03	619,07	922,59	601,61	596,67	643,13	11.259,92
2016	3.972,49	885,59	1.289,36	1.193,86	922,39	660,69	975,92	635,91	637,47	690,20	11.863,88
2017	4.191,92	918,37	1.367,35	1.265,96	964,91	708,53	1.028,45	671,68	670,51	736,28	12.523,95
2018	4.458,45	959,91	1.441,96	1.331,58	1.008,62	749,24	1.082,61	706,01	714,10	785,78	13.238,25
2019	4.681,23	999,10	1.513,51	1.394,49	1.048,20	785,49	1.138,42	740,96	753,28	823,51	13.878,20
2020	4.532,31	957,75	1.512,58	1.392,13	1.053,35	790,85	1.157,80	747,71	760,52	824,14	13.729,12
2021	4.590,26	971,09	1.540,66	1.427,40	1.063,39	812,21	1.177,97	758,45	778,47	830,08	13.949,97
<b>Rata-Rata :</b>											
Nilai PDRB	3.818,75	847,73	1.237,28	1.152,06	895,02	621,70	919,22	598,78	595,26	653,30	11.339,10
Pertumbuhan	4,88	3,33	6,02	5,04	4,07	7,76	8,26	6,93	7,45	6,09	5,53
Kontribusi	33,68	7,48	10,91	10,16	7,89	5,48	8,11	5,28	5,25	5,76	100,00

Sumber : data diolah (2024)

Masyarakat La pago dalam mengakses hasil-hasil pembangunan dapat dilihat dari akses terhadap sektor pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan khususnya upaya pembangunan kualitas hidup manusia dapat menggunakan IPM. IPM selain

digunakan untuk mengukur peringkat kualitas pembangunan manusia di La Pago juga dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada Tabel 4, teramati bahwa perkembangan IPM di La Pago menurut kabupaten sepanjang tahun 2010-2021 konsisten meningkat namun capaian ini masih jauh dibawah rata-rata Papua. Capaian IPM tertinggi disumbangkan oleh Kabupaten Jayawijaya, diikuti oleh Puncak Jaya dan Tolikara, sedangkan capaian IPM terendah terdapat pada Kabupaten Nduga, Puncak dan Pegunungan Bintang. Jika diperhatikan dari sisi pertumbuhan IPM di La Pago, terlihat bahwa walaupun Kabupaten Nduga menempati posisi terendah dalam capaian IPM, namun pertumbuhannya tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di La Pago yakni mencapai 4,79% per tahun, kemudian diikuti oleh Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 2,45% dan Puncak sebesar 2,35%.

**Tabel 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Adat La Pago Dirinci Menurut Kabupaten Tahun 2010-2021 (indeks)**

Tahun	Jayawijaya	Puncak Jaya	Yahukimo	Pegunungan Bintang	Tolikara	Nduga	Lanny Jaya	Mamberamo Tengah	Yalimo	Puncak	La Pago
2010	50,79	38,83	40,63	35,45	43,44	19,62	41,49	39,37	38,47	33,44	38,15
2011	51,66	40,36	41,72	36,61	44,41	21,12	41,90	40,17	40,45	35,08	39,35
2012	52,27	41,85	43,82	37,82	44,86	23,07	42,53	41,39	41,84	36,85	40,63
2013	52,94	43,36	45,63	38,94	45,68	24,42	43,05	42,43	43,33	37,73	41,75
2014	53,37	44,32	46,36	39,68	46,16	25,38	43,28	43,19	44,21	38,05	42,40
2015	54,18	44,87	46,63	40,91	46,38	25,47	44,18	43,55	44,32	39,41	42,99
2016	54,96	45,49	47,13	41,90	47,11	26,56	45,16	44,15	44,95	39,96	43,74
2017	55,99	46,57	47,95	43,24	47,89	27,87	46,49	45,50	46,19	41,06	44,88
2018	56,82	47,39	48,51	44,22	48,85	29,42	47,34	46,41	47,13	41,81	45,79
2019	57,79	48,33	49,25	45,21	49,68	30,75	48,00	47,23	48,08	42,70	46,70
2020	58,03	48,37	49,37	45,44	49,50	31,55	47,86	47,57	48,34	43,04	46,91
2021	58,67	48,99	49,48	46,28	49,60	32,84	48,68	48,32	49,01	43,17	47,50
Pertumbuhan	1,32	2,14	1,81	2,45	1,21	4,79	1,46	1,88	2,23	2,35	2,01

Sumber : data diolah (2024)

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan. Sedangkan tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada Tabel 5, teramati bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah La Pago menurun sepanjang periode tahun 2010-2021, kecuali tahun 2013 dan tahun 2021 yang terlihat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, jika diamati tingkat kemiskinan seluruh kabupaten dalam wilayah La Pago, masih berada jauh diatas tingkat kemiskinan Papua. Pada tahun 2010-2021, tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah La Pago teramati di Kabupaten Lanny Jaya yang perkembangannya fluktuatif dengan rata-rata mencapai 41,52% pertahun atau turun 7,82% sepanjang periode tersebut. Kemudian posisi ke 2 dan ke 3 tertinggi tingkat kemiskinan teramati di Kabupaten Jayawijaya mencapai rata-rata 39,43% per tahun atau menurun 4,75% dan Kabupaten Puncak dengan rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 38,18% pertahun atau menurun 9,05% sepanjang periode 2010-2021.

**Tabel 5. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Adat La Pago Dirinci Menurut Kabupaten Tahun 2010-2021 (%)**

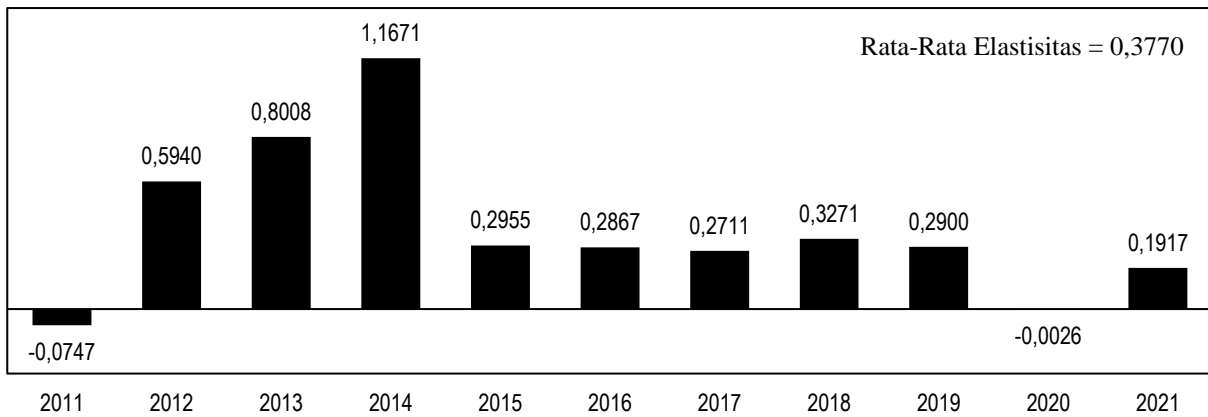
Tahun	Jayawijaya	Puncak Jaya	Yahukimo	Pegunungan Bintang	Tolikara	Nduga	Lanny Jaya	Mamberamo Tengah	Yalimo	Puncak	La Pago
2010	41,84	43,80	46,21	40,08	41,17	42,53	46,55	43,15	44,13	44,65	43,41
2011	41,84	43,81	46,22	40,11	41,18	42,54	46,56	43,17	44,15	44,66	43,42
2012	39,05	38,21	41,98	35,63	36,30	38,14	42,33	42,84	39,49	39,38	39,34
2013	41,81	39,92	43,27	37,23	38,00	39,69	43,79	39,59	40,33	41,96	40,56
2014	39,60	36,15	39,02	32,78	33,27	35,89	39,26	35,47	35,65	37,85	36,49
2015	39,48	37,45	41,26	31,55	34,00	35,89	41,97	35,54	35,88	38,74	37,18
2016	39,66	37,31	40,62	31,52	33,63	38,47	41,68	38,36	35,80	38,58	37,56
2017	38,62	36,01	39,33	30,60	32,73	37,29	39,60	36,38	34,97	37,46	36,30
2018	38,66	36,27	39,25	30,75	33,14	38,13	40,06	37,02	35,45	38,15	36,69
2019	38,33	35,71	38,82	30,51	32,90	38,24	39,52	36,93	34,52	38,24	36,37
2020	37,22	34,74	37,34	30,15	32,04	36,72	38,13	36,41	32,82	36,96	35,25
2021	37,09	36,00	37,64	30,46	32,60	37,18	38,73	36,76	33,25	36,26	35,60
Pertumbuhan	39,43	37,95	40,91	33,45	35,08	38,39	41,52	38,47	37,20	39,41	38,18

Sumber : data diolah (2024)

## 2. Efektifitas Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Sosial-Ekonomi Makro Di Wilayah Adat La Pago

Efektivitas belanja daerah merujuk pada sejauh mana penggunaan anggaran pemerintah daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih luas, ini berarti apakah dana yang dialokasikan untuk berbagai program dan proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, diantaranya terhadap kondisi sosial-ekonomi makro, yang merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh dalam skala besar, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Konsep ini mencakup upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang biasanya diindikasikan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berikut ini dapat dilihat seberapa besar efektifitas belanja daerah di Wilayah Adat La Pago, yang mencakup 10 (sembilan) kabupaten yang berada di wilayah pegunungan, terhadap pertumbuhan ekonomi, yang diukur menggunakan nilai elastisitas diskrit.

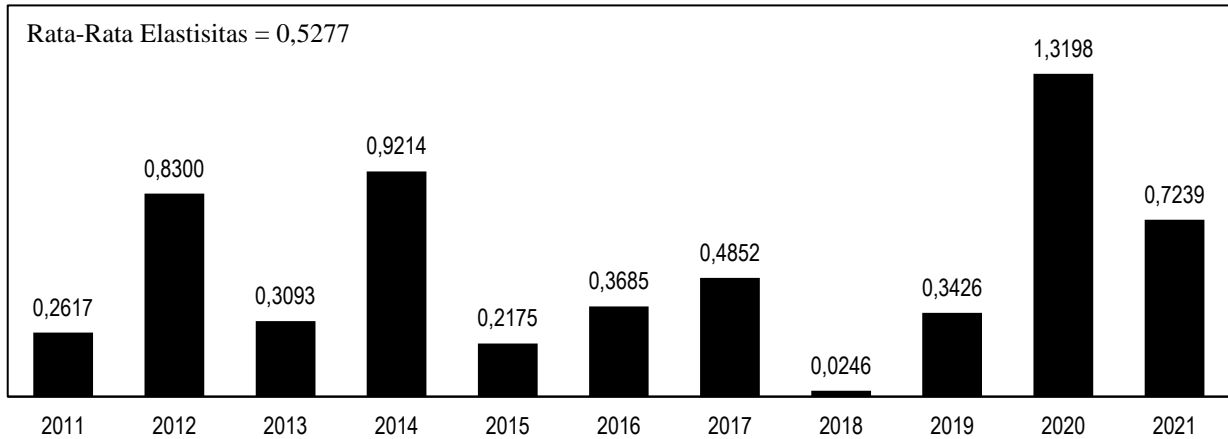
**Gambar 1. Efektifitas Belanja Daerah Terhadap Kenaikan PDRB Di Wilayah Adat La Pago Berdasarkan Nilai Elastisitas Diskrit**



Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, terlihat bahwa nilai elastisitas belanja daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Terdapat tahun di mana elastisitas bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa kenaikan belanja justru tidak diikuti oleh kenaikan PDRB di Wilayah Adat La Pago, sehingga dapat dikatakan belanja daerah tidak efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu pada tahun 2011 dengan nilai elastisitas sebesar -0,0747 dan tahun 2020 sebesar -0,0026. Sebaliknya, ada juga tahun di mana elastisitas bernilai sangat tinggi, menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara belanja dan PDRB, yakni pada tahun 2014 sebesar 1.1671. Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja daerah sebesar 1% mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di La Pago rata-rata sebesar 1,17% (pembulatan). Terlihat juga bahwa sepanjang tahun 2011-2021, nilai rata-rata elastisitas selama periode pengamatan adalah positif 0,3770. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, terdapat hubungan positif antara belanja dan PDRB. Artinya, peningkatan belanja 1% cenderung diikuti oleh peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi sebesar 0,38%. Dengan rata-rata angka elastisitas yang berada dalam range interval 0.20 – 0.40 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan belanja daerah di La Pago terindikasi “kurang efektif” untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang menyebabkan ini terjadi karena sebagian besar daerah yang berada di Wilayah Adat La Pago belum mengalokasikan belanja daerahnya pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan dapat memberikan multiplier effect yang besar. Dimana jika dikaji lebih jauh lagi, kondisi ini disebabkan pada daerah-daerah Wilayah Adat La Pago belum ada sektor-sektor ekonomi produktif yang bersifat *tradeable* mampu menjadi *leading sector* yang memberikan efek multiplier besar bagi perekonomian wilayah. Pondasi perekonomian semua daerah di La Pago pada umumnya masih dominan pada sektor-sektor pertanian primer yang hanya mampu menghasilkan bahan-bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan, sehingga nilai tambah yang diberikan sangat rendah bagi perekonomian wilayah, dan tidak memiliki efek multiplier yang besar.

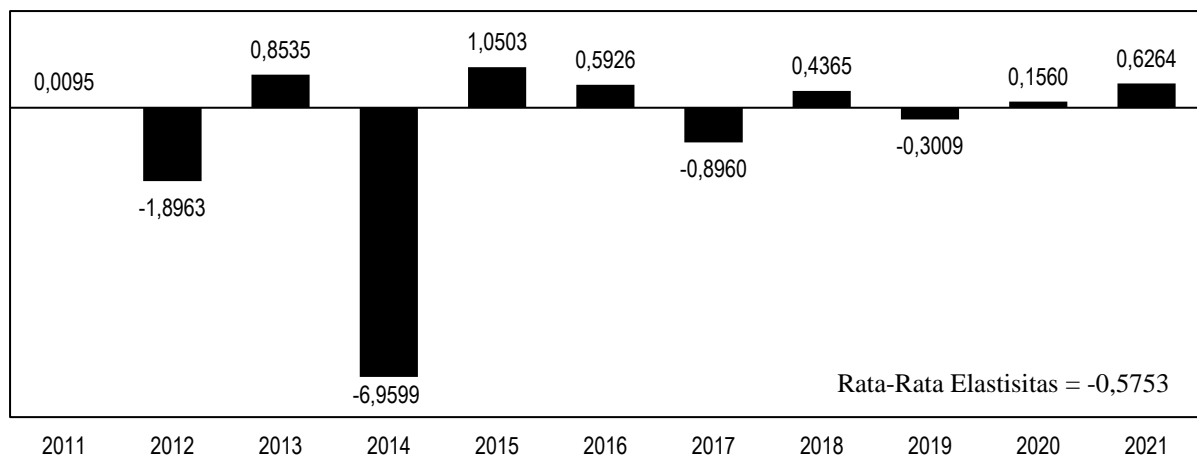
**Gambar 2. Efektifitas Belanja Daerah Terhadap Kenaikan IPM Di Wilayah Adat La Pago Berdasarkan Nilai Elastisitas Diskrit**



Sumber : data diolah (2024)

Perkembangan elastisitas belanja daerah terhadap IPM yang disajikan pada Gambar 2 di atas menunjukkan dengan jelas bahwa nilai elastisitas mengalami fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja dalam meningkatkan IPM tidak selalu konsisten. Namun demikian, kecenderungannya selalu pada angka yang positif, dengan rata-rata sekitar 0,5227 poin., yang menandakan bahwa setiap ada kenaikan belanja daerah sebesar 1% akan direspon dengan kenaikan IPM sebanyak 0,52% (pembulatan). Fakta ini menggambarkan bahwa secara umum, peningkatan belanja telah berkontribusi pada peningkatan IPM di seluruh daerah yang berada di Wilayah Adat La La Pago. Dengan demikian kebijakan belanja daerah yang telah dilakukan di Wilayah Adat La Pago secara umum efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimana jika diperhatikan pada angka elastisitasnya sebesar 0,52 poin, ini termasuk dalam kategori “Cukup Efektif”. Sehingga dapat digeneralisasi lebih jauh bahwa investasi yang dilakukan oleh daerah-daerah yang ada di Wilayah La Pago dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur memberikan kontribusi positif dan cukup efektif terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Agar tingkat efektifitas belanja daerah terhadap kualitas pembangunan manusia semakin lebih efektif, maka daerah-daerah di Wilayah Adat La Pago harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu ketepatan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang menjadi pengungkit paling besar terhadap kenaikan kualitas pembangunan disektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemudian perlu meningkatkan kualitas belanjanya mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dan terakhir, terus meningkatkan kinerja ekonomi makro yang meningkatkan daya beli masyarakat.

**Gambar 3. Efektifitas Belanja Daerah Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Adat La Pago Berdasarkan Nilai Elastisitas Diskrit**



Sumber : data diolah (2024)

Kajian efektifitas belanja daerah berikutnya yang dilakukan dalam studi ini adalah terhadap tingkat kemiskinan. Dari kecenderungan nilai elastisitas belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan yang ditunjukkan pada Gambar 3 di atas, ada indikasi bahwa belanja daerah sepertinya tidak efektif menurunkan kemiskinan di Wilayah Adat La Pago. Meskipun secara rata-rata nilai elastisitasnya  $-0,5753$  per tahun, yang masuk dalam kategori “Cukup Efektif”, namun kondisi itu terjadi akibat adanya nilai elastisitas yang sangat mencolok dan *outlier* di tahun 2014 sebesar  $-6,9599$ , sementara pada tahun pengamatan lainnya cenderung positif. Sehingga, jika perhitungan rata-rata elastisitas mengabaikan tahun 2014, terukur rata-rata elastisitas menjadi positif  $0,0632$  poin, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah di Wilayah Adat La Pago rata-rata tidak efektif untuk menurunkan kemiskinan. Dimana hal ini disebabkan paling utama, karena peningkatan belanja di sebagian besar daerah La Pago tidak disertai dengan alokasi yang tepat dan program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Perhitungan rata-rata elastisitas diskrit kurang representatif untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena tidak dapat menghindari dari satu atau dua angka yang *outlier*. Hal ini sudah terlihat pada contoh di atas. Oleh sebab itu, pada pembahasan sekarang ini, perhitungan elastisitas belanja daerah terhadap perkembangan sosial-ekonomi makro di Wilayah Adat La Pago menggunakan ukuran kontinu dengan mengaplikasikan model regresi elastisitas, dengan hasilnya sebagai berikut.

**Tabel 6. Efektifitas Belanja Daerah Dalam Pembangunan Wilayah Adat La Pago Berdasarkan Nilai Elastisitas Kontinu**

Wilayah	E <sub>PDRB</sub>		E <sub>IPM</sub>		E <sub>Miskin</sub>	
	Koefisien	p-value	Koefisien	p-value	Koefisien	p-value
Jayawijaya	0,5171	0,0000	0,1224	0,0044	-0,0832	0,0591
Puncak Jaya	0,4232	0,0002	0,2179	0,0000	-0,2023	0,0001
Yahukimo	0,5610	0,0000	0,1648	0,0001	-0,1632	0,0001
Pegunungan Bintang	0,3524	0,0000	0,1610	0,0000	-0,1895	0,0000
Tolikara	0,3356	0,0000	0,0977	0,0027	-0,1778	0,0000
Nduga	0,6881	0,0000	0,3747	0,0000	-0,1005	0,0131
Lanny Jaya	0,6271	0,0000	0,1204	0,0011	-0,1397	0,0003
Mamberamo Tengah	0,3084	0,0000	0,0765	0,0010	-0,0941	0,0001
Yalimo	0,6198	0,0000	0,1662	0,0000	-0,2206	0,0000
Puncak	0,3775	0,0001	0,1361	0,0006	-0,1258	0,0022
Wilayah La Pago	0,6934	0,0000	0,1887	0,0000	-0,1309	0,0000

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat jelas bahwa koefisien elastisitas belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (E<sub>PDRB</sub>) di seluruh daerah La Pago memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Ini berarti, secara statistik terindikasi belanja daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dimana jika diamati dari besaran angka koefisien elastisitasnya, ada 3 (tiga) daerah yang dianggap paling baik efektifitasnya, karena mempunyai nilai elastisitas yang terkategori “Efektif” (0,60 – 0,80), yaitu Kabupaten Nduga sebesar 0,6881 poin, Lanny Jaya sebesar 0,6271 poin dan Yalimo sebesar 0,6198 poin. Daerah La Pago lainnya di bawah 0,6000 poin, yang seluruhnya terkategori “Cukup Efektif” dengan nilai elastisitas yang paling kecil adalah Mamberamo Tengah sebesar 0,3084. Secara keseluruhan rata-rata elastisitas E<sub>PDRB</sub> di Wilayah Adat La Pago sebesar 0,6934 poin, yang menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan belanja daerah sebesar 1% maka akan direspon dengan peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi) sebesar 0,69%. Karena angka elastisitas berada pada interval 0,60 – 0,80, maka dapat dikatakan lebih jauh bahwa tingkat efektifitas belanja daerah di Wilayah Adat La Pago dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terkategori “Efektif”.

Selanjutnya, jika diperhatikan pada elastisitas belanja daerah terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia (E<sub>IPM</sub>), seluruh koefisien elastisitas terlihat sangat signifikan oleh karena memiliki p-value lebih kecil dari 0,05. Sehingga secara statistik dikatakan bahwa belanja daerah mempunyai pengaruh dan berkontribusi signifikan terhadap kenaikan IPM. Namun demikian, meskipun berpengaruh signifikan, akan tetapi tingkat efektifitas belanja daerah terhadap peningkatan IPM di

Wilayah Adat La Pago rata-rata terkategori “Sangat Kurang Efektif” atau efektifitasnya sangat rendah. Dengan rata-rata nilai elastisitasnya sebesar 0,1887 poin, yang bermakna bahwa setiap ada kenaikan belanja daerah sebesar 1% hanya mampu menaikkan IPM sebesar 0,19%. Dari serangkaian angka elastisitas tersebut, Kabupaten Nduga dianggap memiliki nilai elastisitas yang tertinggi, yaitu 0,3747 poin.

Selain terlihat sangat kurang efektif terhadap IPM, pengelolaan belanja daerah di Wilayah Adat La Pago terindikasi juga “Sangat Kurang Efektif” terhadap penurunan kemiskinan, meskipun secara statistik terlihat signifikan pengaruhnya yang ditandai dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan besaran elastisitasnya rata-rata sebesar -0,1309, menggambarkan bahwa setiap ada kenaikan belanja daerah sebesar 1% hanya dapat direspon dengan penurunan kemiskinan di Wilayah Adat La Pago sebesar -0,13% (pembulatan). Adapun daerah di La Pago yang memiliki elastisitas paling tinggi adalah Kabupaten Yalimo sebesar -0,2206, dan Puncak Jaya sebesar -0,2023.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Hasil analisis elastistas kontinu menunjukkan bahwa di seluruh daerah di La Pago terindikasi ada hubungan yang sangat signifikan antara peningkatan belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata nilai elastisitas yang tinggi sebesar 0,6934 poin tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan belanja 1% mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,69%. Secara keseluruhan, efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dikategorikan “Efektif”. Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, dan Yalimo memiliki kinerja yang paling baik dalam hal ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang tergambarkan pada fluktuasi perubahan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), belanja daerah juga terlihat memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Namun, tingkat efektifitasnya sangat rendah dengan rata-rata elastisitas hanya 0,1887 poin, yang berarti untuk setiap kenaikan belanja 1% hanya mampu meningkatkan IPM sebesar 0,19%. Efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan IPM dikategorikan “Sangat Kurang Efektif”. Adapun daerah di La Pago yang terindikasi memiliki nilai elastisitas belanja daerah paling tinggi terhadap IPM adalah Kabupaten Nduga sebesar 0,3747 poin. Terakhir, studi ini juga menunjukkan belanja daerah berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, sama seperti IPM, tingkat efektifitasnya sangat rendah dengan rata-rata elastisitas -0,1309 poin. Ini berarti, setiap kenaikan belanja 1% hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,13%, yang dikategorikan “Sangat Kurang Efektif”. Dimana daerah yang paling baik kinerjanya dalam menurunkan kemiskinan adalah Kabupaten Yalimo dan Puncak Jaya, karena memiliki elastisitas yang paling tinggi, masing-masing sebesar -0,2206 dan -0,2023 poin.

### 2. Saran

Studi ini telah memberikan beberapa implikasi, baik itu bersifat praktis maupun teoritis. Implikasi praktis dari hasil temuan studi ini merupakan saran yang penting untuk disampaikan kepada pemerintah daerah yang ada di Wilayah Adat La Pago, yaitu : (1) pemerintah daerah di Wilayah Adat La Pago perlu mengkaji ulang prioritas penganggaran. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan IPM dan pengurangan kemiskinan juga perlu menjadi fokus utama, karenanya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan harga dan pasar, maupun bantuan sosial patut dioptimalkan tingkat efektifitasnya; (2) program-program yang didanai oleh belanja daerah perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektifitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan; dan (3) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sangat penting untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah.

Adapun implikasi teoritisnya merupakan saran yang terkait dengan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas belanja daerah dalam pembangunan suatu daerah, yaitu : (1) perlu mendisagregasi belanja daerah dalam beberapa bagian, misalkan belanja langsung dan tidak langsung, belanja menurut fungsi, bahkan yang lebih komprehensif jika fokus pada variabel belanja daerah menurut program yang berkorelasi dengan variabel *impact*-nya yang akan diamati; dan (2) perlu menambahkan variabel-variabel makro sosial-ekonomi, yang dianalisis menggunakan *system equation*, bukan sebatas *single equation* yang digunakan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS Papua. 2023. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Menurut Pengeluaran, 2019-2023. Penerbit ©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- \_\_\_\_\_. 2023. Provinsi Papua Dalam Angka Papua 2023. Penerbit ©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- \_\_\_\_\_. 2023. Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Papua 2023. Penerbit ©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- \_\_\_\_\_. 2024. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2023. Penerbit ©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- Codagnone, C., and Undheim, T. A. 2008. Efficiency and effectiveness. *European Journal of ePractice*, No. 4 August 2008 : pg. 4-18.
- Ditjen Perimbangan Keuangan RI. 2024. Data Series APBD. [<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>]
- Haryanto., Sahmuudin., dan Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kaat. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010–2015. Tesis Program Magister Ilmu Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mahar, L. A. 2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Selatan Tahun 2010-2016. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Raden Fatah*, Vol. (2). No. 6 : hlm. 37–39.
- Mandl, U., Dierx, A., and Ilzkovitz, F. 2008. The Effectiveness And Efficiency Of Public Spending. *European Commission DGEFA Publications*, Brussels.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- McCormick, J. S. 1981. Effectiveness and efficiency. *Journal of the Royal College of General Practitioners*, May,1981 : pg. 299-302
- Nusan, Y., Benius, and Hukom, A. 2021. Analysis of the Effectiveness in Planning and Realization Regional Income and Expenditure Budget By the Government of Palangka Raya City Year 2019-2020. *BIRCI-Journal*, Vol. (4), No. 3 : pg. 3852-3858.
- Poskart, R. 2014. A definition of the concept of economic effectiveness. *Central Eastern European Journal of Management and Economics*, Vol. (2), No. 3 : pg. 179-187.
- Sarkis, J., Talluri, and Srinivas. 2022. Efficiency Measurement of Hospital: Issues and Extensions. *International Journal of Operation and Production Management*. Vol. (22), No. 3 : pg. 306-313.